



OPD Cemas Pegawai Dipangkas

OPD Cemas Pegawai Dipangkas

Laskar Pelangi Banyak di Diskes

REPORTER MUHLIS MAJID
EDITOR ILHAM WASI

MAKASSAR, FAJAR – Ribuan tenaga honorer atau Laskar Pelangi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diliputi kekhawatiran. Itu terkait isu pemangkas pegawai akibat efisiensi anggaran.

BADAN Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pun menegaskan tidak ada pengurangan pegawai. Kepala BPKAD Makassar, Muhammad Dakhlan menegaskan, meskipun pengurangan tenaga honorer merupakan bagian dari kebijakan, pihaknya hanya bertugas menyiapkan anggaran. "Sampai saat ini belum ada pemotongan.

Penganggaran masih sesuai dengan yang direncanakan," ujarnya.

Hingga kini belum ada arahan dari pemerintah pusat terkait pengurangan pegawai. "Kita hanya menunggu petunjuk atau kejelasan bagi tenaga Non-ASN," katanya.

Di sisi lain, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai cemas dengan

isu efisiensi ini. Khususnya OPD yang memiliki tenaga Laskar Pelangi dalam jumlah besar, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar.

Kadiskes Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan persoalan kelebihan tenaga

Diskes mengalami overkapasitas tenaga honorer. Ada yang tidak bisa terakomodir karena keterbatasan anggaran."

dr Nursaidah Sirajuddin
Kadiskes Makassar

❖ Baca OPD... Hlm 15

OPD Cemas Pegawai Dipangkas

❖ Lanjutan Halaman... 9

Laskar Pelangi dalam rapat koordinasi manajemen kepegawaian yang dihadiri Sekretaris Kota Makassar. "Diskes mengalami overkapasitas tenaga honorer. Ada yang tidak bisa terakomodir karena keterbatasan anggaran," ungkapnya.

Meski demikian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar tengah mencari solusi agar tenaga honorer tetap bisa bekerja. "Pak Sekda sudah mengarahkan agar tidak ada tenaga honorer yang dinonaktifkan karena SK mereka sudah ada di tangan," tambahnya.

Diskes Makassar sendiri kata dia, sudah mendorong sekitar 600 Laskar Pelangi untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Termasuk tenaga yang bekerja di rumah sakit daerah.

"Makassar menjadi kota pertama di Indonesia yang mendorong pengangkatan honorer menjadi PPPK secara masif. Kami prioritaskan mereka yang sudah mengabdikan belasan

hingga puluhan tahun," ujarnya.

Selain itu, Diskes juga berupaya mengoptimalkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi puskesmas, sehingga memiliki fleksibilitas dalam merekrut tenaga kerja. "Dengan status BLUD, puskesmas bisa merekrut tenaga kesehatan secara mandiri sesuai kebutuhan," katanya.

Saat ini tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas. Ini untuk memastikan solusi terbaik bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi. Meskipun masih ada tenaga magang yang belum bisa didorong menjadi honorer karena aturan Kemendagri.

Diskes juga mencari solusi agar tidak ada pemutusan hubungan kerja secara sepihak. "Intinya, tidak ada pemangkas tenaga honorer. Mereka sudah pegang SK, dan arahan Pak Sekda jelas. Jangan pernah ada pemutusan kontrak," tegasnya. Apalagi, kelebihan tenaga Laskar Pelangi hanya 29

orang. "Insyaallah ada solusi apalagi kita BLUD yang ke depannya bisa mengelola SDM sendiri," paparnya.

SPPD Dikurangi 30 Persen

Pemkot Makassar sudah melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas (SPPD) 30 persen. Itu sebelum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 diberlakukan. Inpres tersebut mengatur pemotongan SPPD hingga 50 persen.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi yang jelas mengenai alokasi pemotongan anggaran tersebut. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muhammad Dakhlan mengungkapkan, Pemkot masih menunggu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebijakan tersebut. "Pertanyaannya sekarang, setelah kita kurangi 50 persen, anggaran ini akan dialihkan ke mana? Itu yang belum jelas," katanya.

Jika aturan tersebut diterapkan, Pemkot Makassar tinggal menyesuaikan pemotongan sebesar 20 persen lagi. Mengingat, efisiensi 30 persen sudah dilakukan sebelumnya. Selain SPPD, Dakhlan juga mengungkapkan, ada pengurangan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan seremonial.

Namun, ada sejumlah kegiatan yang tetap membutuhkan anggaran, seperti penyusunan laporan keuangan di BPKAD. "Laporan dana BOS untuk semua sekolah harus tetap ada," jelasnya, Kamis, 20 Februari.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), Dakhlan menegaskan, tidak ada pemangkas untuk Makassar. Tetap menerima dana transfer sebesar Rp2,46 triliun. Untuk mendapatkan kepastian lebih lanjut, Pemkot Makassar masih menunggu kebijakan terbaru dari Kemendagri, terutama terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang dijadwalkan akan mulai dibahas pada bulan Maret hingga Juli 2025. (*/*)